

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah ialah salah satu penerimaan daerah yang berasal dari wilayahnya itu sendiri. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia terus meningkatkan segala bidang dalam pembangunan. Pembangunan tersebut misalnya berupa pembangunan jembatan, pembangunan jalan, pembangunan embung, dan gedung-gedung lainnya. Hal itu bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan yang baik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, selain itu faktor keuangan akan menjadi hal yang penting dalam pembangunan daerah. Faktor keuangan itu sendiri akan mempengaruhi pada kemampuan suatu daerah dalam hal menyelenggarakan pemerintahannya. Kinerja dalam pengelolaan pada pendapatan daerah dapat ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna dapat memberikan manfaat yang baik atas pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hasil akhir yang dapat diharapkan yaitu kontribusi pada pendapatan dari beberapa sektor retribusi dan pajak daerah terhadap upaya dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang semakin meningkat.

Salah satu faktor penunjang pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah ialah dari sektor pariwisata daerah itu sendiri. Sektor pariwisata juga dapat disebut sebagai penggerak industri lain seperti sektor industri dan jasa.

Pengaruh mempromosikan pembangunan ekonomi dari sektor pariwisata dapat menambah jumlah karyawan dan banyaknya lapangan pekerjaan, dapat sebagai distribusi pembangunan dan juga sebagai sumber pendapatan negara.

Pemberlakuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pembagian keuangan Pusat dan Daerah telah memberikan dampak yang luas terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberi daerah kekuasaan dan kewajiban untuk melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk pengelolaan keuangan pendapatan daerah. Berikut data pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul.

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul

No	Tahun	Realisasi PAD Kabupaten Bantul	Persentase %
1	2010	81.646.839.293,07	92%
2	2011	128.896.456.173,41	112%
3	2012	166.597.778.028,56	118%
4	2013	224.197.857.443,31	109%
5	2014	357.271.829.724,21	124%
6	2015	390.743.330.689,34	116%
7	2016	403.296.991.364,44	108%
8	2017	313.532.794.163,23	123%
9	2018	404.630.323.767,44	107%
10	2019	447.476.845.134,93	110%
11	2020	425.522.566.278,49	115%

Sumber: Dinas BKAD Kabupaten Bantul 2010-2020

Tabel 1.1 berdasarkan PAD memperlihatkan presentase yang dihitung dari hasil realisasi yang diperoleh dalam penerimaan PAD di Kabupaten Bantul dari tahun ketahun yang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Pada tahun 2010 mencapai realisasi sebesar Rp 81.646.839.293,07 presentasinya sebesar 92% yang dimana tidak mencapai 100% dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2011 dan 2012 mencapai realisasi sebesar Rp 128.896.456.173,41 dengan presentase 112% dan Rp 166.597.778.028,56 dengan presentase 118%, tahun 2013 mengalami penurunan presentase sebesar 109% dengan realisasi sebesar Rp 224.197.857.443,31, pada tahun 2014 PAD mengalami kenaikan presentase sebesar 124%, dan mengalami penurunan presentase lagi pada tahun 2015 dan 2016 dengan jumlah presentase sebesar 116% dan 108%, PAD mengalami kenaikan presentase sebesar 123% dengan realisasi sebesar Rp 313.532.794.163,23 dan mengalami penurunan kembali periode tahun 2018 sampai tahun 2020.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang adanya Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan yang dapat dipungut oleh daerah dan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk merumuskan peraturan daerah. Pendapatan daerah itu sendiri muncul dari pendapatan pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan aset daerah yang dapat dipisahkan dan pendapatan lain yang sah. Peran pendapatan daerah lebih penting, karena dapat mencerminkan keberhasilan badan usaha dan peran tingkat pembiayaan daerah dalam pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tabel 1. 2 Data Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Obyek Wisata, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Reklame Kabupaten Bantul Tahun 2010-2020

No	Tahun	Retribusi Obyek Wisata	Pertumbuhan %	Pajak Hotel	Pertumbuhan %	Pajak Restoran	Pertumbuhan %	Pajak Reklame	Pertumbuhan %
1	2010	2.166.976.900,00	0%	91.689.000,00	0%	393.816.400,00	0%	1.928.535.601,00	0%
2	2011	1.625.026.100,00	-25%	131.241.900,00	43%	1.522.413.345,00	287%	2.078.745.604,00	8%
3	2012	65.441.100,00	-96%	823.428.554,00	527%	2.855.070.517,40	88%	2.718.571.111,00	31%
4	2013	62.880.000,00	-4%	1.154.023.956,00	40%	3.762.937.995,00	32%	3.255.704.581,00	20%
5	2014	47.840.000,00	-24%	1.168.040.063,00	1%	4.459.210.988,00	19%	2.513.332.174,00	-23%
6	2015	52.760.000,00	10%	1.269.706.521,50	9%	5.329.984.785,50	20%	2.373.986.161,00	-6%
7	2016	197.069.500,00	274%	1.349.735.081,00	6%	7.008.499.572,37	31%	2.448.503.082,00	3%
8	2017	711.925.000,00	261%	1.569.261.167,00	16%	8.975.258.421,00	28%	2.196.366.698,00	-10%
9	2018	845.355.000,00	19%	2.725.071.153,00	74%	12.200.886.407,63	36%	2.446.041.981,00	11%
10	2019	804.180.000,00	-5%	3.841.960.122,00	41%	15.137.093.141,00	24%	2.314.177.264,00	-5%
11	2020	567.786.486,00	-29%	1.458.163.865,00	-62%	9.207.214.234,78	-39%	2.213.962.903,00	-4%

Sumber: Dinas BKAD Kabupaten Bantul

Retribusi obyek wisata mengalami penurunan sangat besar pada tahun 2011 sebesar Rp 1.625.026.100,00 ketahun 2012 dengan realisasi sebesar Rp 65.441.100,00, penurunan tersebut terjadi secara terus menerus sampai pada tahun 2015. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dengan realisasi sebesar Rp 804.180.000,00 mengalami kenaikan terus-menerus dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar Rp 567.786.486,00.

Pajak hotel mengalami kenaikan secara terus-menerus periode tahun 2010 sampai 2019 dengan realisasi sebesar Rp 3.841.960.122,00 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar Rp 1.458.163.865,00.

Pajak restoran pada tahun 2010-2019 mengalami pertumbuhan yang sangat bagus sehingga mendapatkan realisasi yang jumlahnya bisa dikatakan dengan jumlah yang besar. Namun pada tahun 2020 itu sendiri mengalami penurunan realisasi dengan jumlah sebesar Rp 9.207.214.234,78.

Pajak reklame mengalami fluktuasi secara terus menerus dari realisasi tahun 2013 sebesar Rp 3.255.704.581,00 dan tahun 2014 menurun sebesar Rp 2.513.332.174,00, penurunan tersebut terjadi hingga tahun 2015. Tahun 2016 mengalami kenaikan kembali dengan realisasi Rp 2.448.503.082,00, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 2.196.366.698,00. Terhitung pada tahun 2017 tersebut mengalami penurunan, dimana tahun 2018 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp 2.446.041.981,00. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan kembali dengan realisasi sebesar Rp 2.314.177.264,00 dan Rp 2.213.962.903,00.

Retribusi daerah ialah salah satu komponen dari pendapatan asli daerah yang dihasilkan secara lokal. Retribusi daerah dapat dipungut yang berhubungan dengan fasilitas atau layanan yang diberikan pemerintah kepada pembayar secara langsung dan nyata (Zahari, 2016).

Dari tabel 1.2 diatas juga, terdapat retribusi obyek wisata yang ialah objek dari retribusi jasa usaha. Dapat kita lihat bahwa data pada kolom retribusi obyek wisata tahun 2012-2015 mengalami penurunan secara drastis yang disebabkan oleh manajemen penyelenggara tempat wisata tersebut tidak membuat perubahan terhadap tatanan tempat wisata yang dapat menarik lagi masyarakat yang sudah mengunjungi tempat tersebut untuk mengunjungi kembali. Dimana dapat dibandingkan dengan tahun 2011 dan mulai adanya pertumbuhan lagi pada tahun 2016. Pada tahun 2020 juga terjadinya penurunan pendapatan yang disebabkan karena adanya wabah virus Covid-19 yang merubah perekonomian masyarakat seluruh Indonesia menjadi mengalami penurunan. Dan peningkatan retribusi obyek wisata tertinggi terjadi pada tahun 2010, peningkatan ini terjadi karena pada tahun 2010 masyarakat Yogyakarta banyak dikenalkan oleh beberapa tempat wisata yang baru dan menarik perhatian para wisatawan untuk mengunjunginya. Namun seiring waktu, keramaian tempat wisata tersebut hanya bertahan sebentar dikarenakan tempat wisata tersebut kurang dikembangkan lagi oleh pengelolanya sehingga menyebabkan masyarakat sekitar menjadi bosan dengan tampilan tempat wisata yang begitu terus-menerus dan tidak adanya perubahan yang bagus. Karena jika adanya penataan maupun perubahan pada tempat wisata menjadi lebih bagus dan nyaman lagi akan membuat masyarakat menjadi tenang dan senang mengunjungi

tempat wisata tersebut secara terus-menerus. Dengan hal sepiunya pengunjung seiring waktu berjalan karena tidak adanya perubahan tampilan sehingga membuat masyarakat bosan mengunjungi tempat wisata tersebut dapat menyebabkan hasil pajak daerah dari retribusi obyek wisata tersebut akan membuat Pendapatan Asli Daerah menurun.

Hasil pajak daerah ialah sumber pendapatan yang berpengaruh dan memainkan peran yang sangat penting untuk peningkatan hasil pendapatan asli daerah. Pada tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa terdapat pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame dari beberapa jenis pajak tersebut ialah bagian dari pajak daerah.

Dari data tabel 1.2, kita dapat melihat pajak hotel dan pajak restoran mengalami penurunan yang sama pada tahun 2020. Yang disebabkan oleh wabah virus yang membuat pada tahun 2020 tersebut sedikitnya para pengunjung dari luar kota yang melaksanakan wisata ke wilayah Yogyakarta terutama pada Kabupaten Bantul. Dikarenakan pada awal wabah tersebut juga Indonesia banyak yang menerapkan penutupan wilayah sementara untuk menghindari penyebaran wabah tersebut terlalu banyak. Pertumbuhan tertinggi pajak hotel dan pajak restoran juga mengalami persamaan yaitu pada tahun 2019 dengan jumlah sebesar Rp 3.841.960.122 pajak hotel dan untuk pajak restoran dengan jumlah sebesar Rp 15.137.093.141. peningkatan ini terjadi karena tingginya tingkat hunian hotel dan ramainya pengunjung restoran. Dan penerimaan pajak reklame banyak yang mengalami penurunan yaitu pada tahun 2014, 2017, 2019 dan 2020. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya pihak-pihak yang pemasang iklan belum

melunasi kewajibannya atau masih banyaknya yang melakukan denda pada membayar pajak. Sedangkan pertumbuhan yang tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 20% atau Rp 3.255.704,581.

Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak di dekat pantai parangtritis dan pantai lainnya. Terdapat juga beberapa tempat wisata yang hits di Kabupaten Bantul seperti kebun buah mangunan, paralayang, hutan pinus. Seperti yang dapat diketahui potensi inilah yang disadari bahwa Kabupaten Bantul ini memiliki banyak keindahan tempat berwisata yang perlu di gali dengan serius.

Potensi wisata di Kabupaten Bantul cukup tinggi, apabila dikembangkan secara maksimal tentunya para wisatawan memiliki minat dalam berkunjung ke wisata yang ada di Kabupaten Bantul. Selain itu peningkatan pada kunjungan para wisatawan yang mengunjungi juga akan dapat menunjang adanya pemasukan bagi hotel dan restoran. Dan dengan adanya peningkatan para wisatawan yang ada di Kabupaten Bantul, maka akan menarik para pihak yang menyelenggarakan reklame untuk memasang iklan atau baliho dan semacamnya di Kabupaten Bantul. Sehingga dari potensi tersebut dapat memberikan kontribusi positif terhadap pada Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame. Namun pengelolaannya belum optimal pada dalam pengambilan pajak karena kesadaran dari wajib pajak masih rendah dimana pentingnya dalam membayar pajak, guna dapat memberikan peran positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Alasan menggunakan variabel retribusi obyek wisata, pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame adalah dikarenakan variabel-variabel tersebut yang

memberikan kontribusi paling tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli daerah menurun dapat dikarenakan tidak patuhnya wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak tepat waktu dan terjadinya denda terus-menerus jika tidak patuh dalam membayar pajak. Dalam hal retribusi obyek wisata menurun dikarenakan masih adanya masyarakat yang tidak membayar uang retribusi pada tempat wisata tersebut. Pajak reklame juga dapat memberi dampak penurunan pendapatan asli daerah jika para penyelenggara reklame tidak mendaftarkan reklamnya dan menggunakan media sosial sebagai alternatif untuk mempromosikan jasa maupun barang dapat memberi dampak berkurangnya pendapatan daerah itu sendiri.

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal pendapatan asli daerah dengan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti diantaranya dilakukan oleh (Erawati & Hurohman, 2017), (Asrida & Lumur, 2020), dan (Utami, 2015) dengan hasil penelitian yang berbeda-beda. (Erawati & Hurohman, 2017) membuktikan bahwa pada pajak hotel maupun pajak reklame secara parsial tidak berpengaruh terhadap potensi pendapatan asli daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Asrida & Lumur, 2020) dan (Utami, 2015) membuktikan bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan data dan beberapa penjelasan tersebut, maka hal ini membuat penulis tertarik meneliti bagaimana besarnya **“Pengaruh Retribusi Obyek Wisata, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka dapat penulis rumuskan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah retribusi obyek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul?
2. Apakah pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul?
3. Apakah pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul?
4. Apakah pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul?
5. Apakah retribusi obyek wisata, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk membuktikan pengaruh retribusi obyek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul.
2. Untuk membuktikan pengaruh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul.
3. Untuk membuktikan pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul.

4. Untuk membuktikan pengaruh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul.
5. Untuk membuktikan pengaruh retribusi obyek wisata, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat diperlukan untuk memberikan data yang tepat dan benar, selain itu pemeriksaan ini juga diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi peneliti selanjutnya.

Hasil penelitian ini akan dapat memberikan wawasan pengetahuan mengenai bagaimana Pengaruh dari Retribusi Obyek Wisata, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2020. Dan juga dapat membandingkan teori pada masa perkuliahan dengan penerapannya di dalam instansi.

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan kepada instansi dalam menentukan kebijakan dalam permasalahan pajak daerah guna dalam menunjang peningkatan pendapatan asli daerah.

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi dan informasi yang dapat membandingkan dengan penelitian yang baru dalam bidang yang sama.

1.5 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah dapat digunakan mungkin bermanfaat dalam hal menghindari penyimpangan dan memperluas area topik sehingga penelitian lebih

mudah untuk dibahas dan tujuan penelitian terpenuhi. Berikut ini ialah beberapa kendala masalah dalam penelitian ini:

1. Berisi beberapa informasi terkait pajak.
2. Dampak retribusi objek wisata, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pendapatan asli daerah semuanya dapat disajikan.

